

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan ekonomi makro nasional jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran makro tahun 2017, diantaranya adalah pertumbuhan PDB Tahun 2017 ditargetkan 7,1 % ; PDB per kapita Rp 58.489.000,00 ; laju inflasi ditargetkan pada 4% ; nilai tukar nominal Rp 12.100/US\$; Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,5%; Tingkat Pengangguran 5,0 – 5,3 %.

Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi, penciptaan kondusivitas wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian lingkungan, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui :

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah
2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik
3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal
4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah
5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan
6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat factor-

faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi makro daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan dan proyeksi indikator makro ekonomi
Kabupaten Purworejo

No		2013	2014	2015*)	2016*)	2017*)
1.	Pertumbuhan ekonomi					
	- Pertumbuhan ekonomi	4.99	5.00	5.24	5.5	5.76
	- PDRB Atas Dasar Konstan Tahun 2000	3.493.600,85	3.668.253,47	3,851,717.88	4,044,358.10	4,044,358.10
	- PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	8.733.568,00	9.644.686,075	10.647.359,09	11.754.271,18	12.976.259,16
2.	Pendapatan perkapita	12,379,558.40	13,671,039.66	15,045,070.99	16,557,201.69	18,221,311.69
3.	Inflasi	7.14	8.48	3.45	3.00	2.5
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.11	5.1	4.5	4.3	4.1
5.	Kemiskinan	15.44	14.57	13.7	12.2	11.3
6.	IPM	69.77	70.12	70.62	71.12	71.63

Sumber Data: BPS Kabupaten Purworejo dan hasil analisa tim

1. Pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit peningkatan dari 4,99 pada tahun 2013 menjadi 5 % pada tahun 2014. Sampai dengan tahun 2017 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo sebesar 5,75% pada tahun 2017
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 yaitu angka yang menunjukkan aktivitas ekonomi riil masyarakat (sudah dihilangkan pengaruh inflasinya), mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebesar Rp 3.493.600,85 juta per tahun naik menjadi Rp 3.668.253,47

juta pada tahun 2014, pada tahun 2017 diharapkan dapat mencapai Rp 4,044,358.10 juta pertahun.

3. Sementara itu untuk pendapatan perkapita yaitu rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap orang di Purworejo setiap tahunnya mencapai angka Rp 12.379.558,4 per orang per tahun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 13.671.039,66 pada tahun 2014, dan diproyeksikan mencapai Rp 18.221.311,69 per orang per tahun pada tahun 2017.
4. Inflasi yaitu indikator yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum, yang mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2013 ke 2014 yaitu dari 7,14 menjadi 8,48 ternyata mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3,45. Kondisi ini diproyeksikan akan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 hingga dapat mencapai 2,5%

Bagaimana pendapatan-pendapatan tersebut terdistribusikan di masyarakat, kondisinya dapat ditinjau antara lain melalui indikator-indikator kesenjangan seperti kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal tersebut juga dapat tercermin dari besaran Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun pendapatannya. Indikator-indikator tersebut secara kuantitatif menunjukkan perbaikan kondisi dari tahun ke tahun meskipun progressnya belum seperti yang diharapkan. Kondisi ini diproyeksikan masih akan berlangsung sampai dengan tahun 2017.

Memperhatikan perkembangan indikator makro ekonomi daerah dan proyeksinya tersebut maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purworejo diarahkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas daerah, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan mengoptimalkan potensi daerah di bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan budaya.
2. Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah
3. Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan

3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

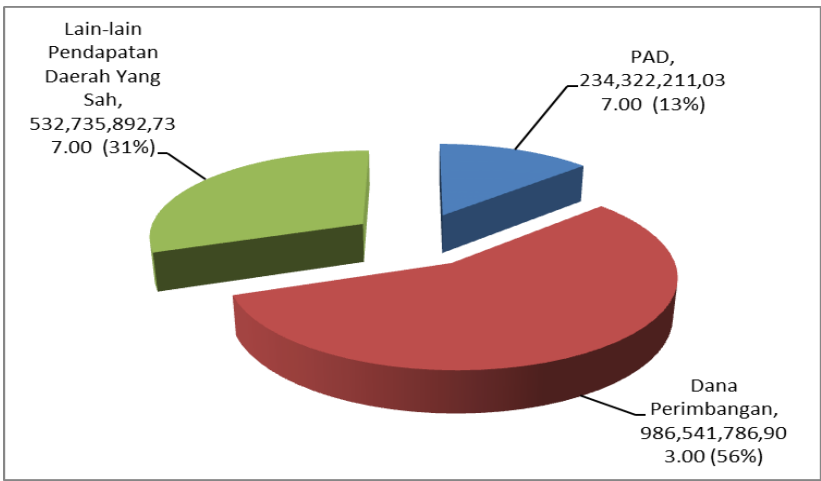
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Analisis kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melihat jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu hal yang dijadikan prioritas daerah dalam meningkatkan proyeksi pendapatan adalah bagaimana daerah dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan khususnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pertumbuhan PAD akan memberikan arti penting bagi kondisi keuangan daerah.

Selain daripada faktor pertumbuhan tersebut, faktor perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait kewenangan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya juga berpengaruh pada prediksi kapasitas keuangan daerah. Pergeseran beberapa kewenangan daerah terkait PAD terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Gambar 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kab.Purworejo Tahun 2015



Sumber Data: DPPKAD, LRA APBD Tahun 2015

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana tampak dalam gambar 3.1 tersebut diatas. Porsi terbesar adalah berasal dari dana perimbangan sebesar 56% kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 31% dan terakhir adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 13%. Sementara perkembangannya selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kab.Purworejo Tahun 2010 s.d 2014

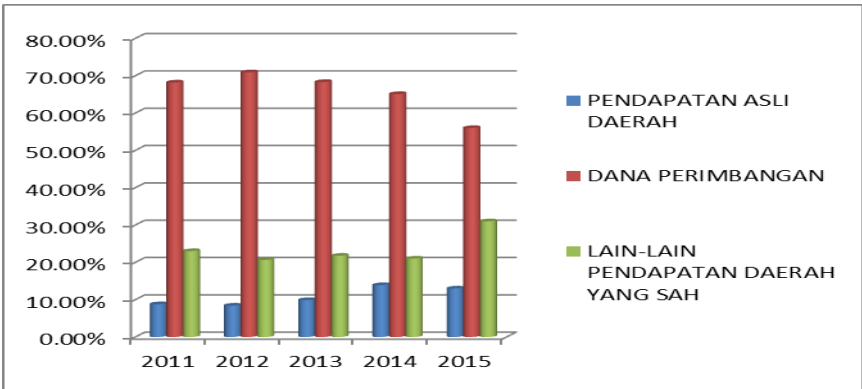
No.	Uraian	Realisasi (Juta Rupiah)					Rata-rata pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	
	PENDAPATAN	1,013,075.37	1,167,943.58	1,287,470.81	1,441,117.38	1,753,599.89	13,51
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	88,941.78	98,262.00	125,756.04	200,258.60	234,322.21	22.62
	Pendapatan Pajak Daerah	12,014.22	12,114.23	28,690.22	34,200.15	38,013.93	
	Hasil Retribusi Daerah	12,202.19	14,620.64	16,922.71	21,953.44	16,713.47	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,849.83	3,120.00	4,153.67	5,073.86	5,784.97	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61,875.54	68,407.13	75,989.43	139,031.16	173,809.84	
	DANA PERIMBANGAN	690,786.57	828,200.75	880,976.70	938,015.39	986,541.79	9.43
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43,993.15	46,890.51	33,749.00	26,253.27	25,192.55	
	Dana Alokasi Umum	585,851.02	711,741.84	793,904.68	854,737.50	875,528.05	
	Dana Alokasi Khusus	60,942.40	69,568.40	53,323.02	57,024.62	85,821.19	
	LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233,347.02	241,480.82	280,738.07	302,843.40	532,735.89	19.98
	Pendapatan Hibah	2,306.43	895.98	0.00	328.19	0.00	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31,723.71	48,908.37	47,971.74	62,847.79	79,447.29	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173,573.41	155,803.54	210,021.22	208,929.74	305,866.18	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,743.47	35,872.94	22,745.11	30,737.68	23,002.96	
	Alokasi Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	124,419.46	

Sumber Data: DPPKAD, LRA APBD Tahun 2010 s.d 2014

Dalam tabel 3.1 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir pendapatan daerah rata-rata tumbuh sebesar 13,51%. Masing-masing ketiga sumber pendapatan daerah sama-sama terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing adalah 22,62% untuk Pendapatan Asli Daerah, 9,43% untuk Dana Perimbangan dan 19,98% untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sementara itu bagaimana perkembangan proporsi masing-masing sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah tampak dalam gambar 3.2 berikut ini.

Gambar 3.2 Perkembangan Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kab.Purworejo Tahun 2011 s.d 2015

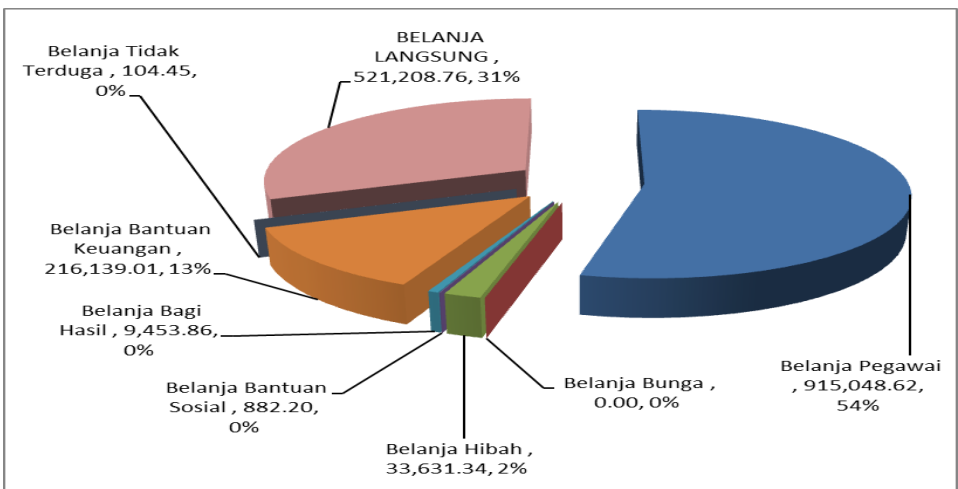


Sumber Data: DPPKAD, LRA APBD Tahun 2011 s.d 2015 (diolah)

Pendapatan Asli Daerah meskipun proporsinya masih tetap paling kecil selama 5 (lima) tahun terakhir namun memiliki kecenderungan proporsinya yang terus meningkat. Hal ini terutama didorong oleh adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah dari pajak pusat menjadi pajak daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping juga adanya upaya intensifikasi sumber-sumber PAD lainnya.

Sebaliknya Dana Perimbangan sebagai kontributor utama dan terbesar dalam pendapatan daerah, secara proporsi justru terus mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah berpengaruh pada besaran bagi hasil pajak untuk daerah yang pertumbuhannya menjadi negatif.

Gambar 3.3
Realisasi Belanja Daerah APBD Kab.Purworejo Tahun 2015
(dlm Juta Rupiah)



Sumber Data: DPPKAD, LRA APBD Tahun 2015

Realisasi belanja sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana tampak dalam gambar 3.3 tersebut diatas. Porsi belanja daerah terbesar adalah pada pos belanja pegawai yaitu sebesar 54% dengan nilai Rp 915 Milyar. Kemudian terbesar kedua adalah digunakan untuk belanja langsung sebesar 31% dengan nilai kurang lebih Rp 521 Milyar. Belanja Langsung ini merupakan belanja yang digunakan mendanai pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Berikutnya sebesar Rp 216 Milyar atau 13% digunakan untuk mendanai pos belanja bantuan keuangan. Bagaimana dengan perkembangannya

selama 5 (lima) tahun terakhir sejak dari tahun 2011 tampak dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah APBD Kab.Purworejo
Tahun 2011 s.d 2015

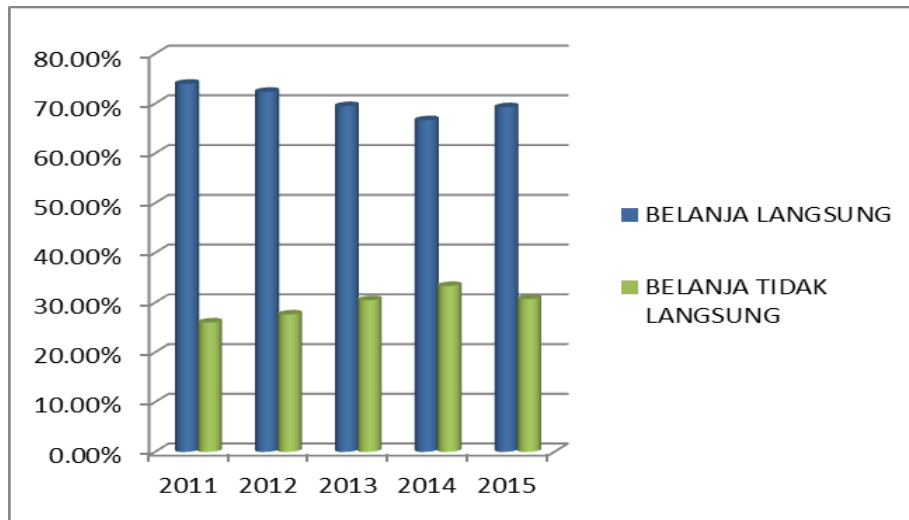
	Realisasi (dlm Juta Rupiah)					Rata-rata Pert
	2011	2012	2013	2014	2015	
BELANJA	968,310.61	1,126,130.84	1,204,819.24	1,445,588.97	1,696,468.24	13.24
BELANJA TIDAK LANGSUNG	716,511.17	815,095.68	837,558.46	963,659.32	1,175,259.48	9.54
Belanja Pegawai	655,308.73	741,354.18	773,594.02	849,023.65	915,048.62	
Belanja Bunga	69.07	72.83	0.00	0.00	0.00	
Belanja Hibah	20,810.53	23,567.84	5,156.49	26,738.08	33,631.34	
Belanja Bantuan Sosial	11,391.86	4,471.43	8,185.00	1,229.00	882.20	
Belanja Bagi Hasil	0.00	2,816.90	0.00	11,462.89	9,453.86	
Belanja Bantuan Keuangan	28,304.73	42,540.00	50,513.95	75,067.78	216,139.01	
Belanja Tidak Terduga	626.25	272.50	109.00	137.93	104.45	
BELANJA LANGSUNG	251,799.44	311,035.16	367,260.78	481,929.64	521,208.76	22.34
Belanja Pegawai	38,246.66	37,179.50	43,137.30	53,110.64	45,828.91	
Belanja Barang dan Jasa	125,687.35	124,750.74	143,269.69	212,056.06	235,829.05	
Belanja Modal	87,865.43	149,104.92	180,853.78	216,762.94	239,550.79	

Sumber Data: DPPKAD, LRA APBD Tahun 2011 s.d 2015

Dalam tabel 3.3 tersebut diatas, tampak bahwa belanja dalam APBD selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 13,24%. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 9.54% sementara belanja langsung rata-rata 22.34%.

Proporsi belanja daerah juga menunjukkan dinamika tersendiri selama 5 (lima) tahun terakhir. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga secara keseluruhan menunjukkan proporsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya Belanja Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal meskipun porsinya jauh lebih kecil dari belanja tak langsung namun proporsinya mengalami peningkatan terus menerus selama 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangan proporsi masing-masing jenis belanja tersebut tampak dalam gambar 3.4 berikut ini:

Gambar 3.4
Perkembangan Proporsi Belanja Daerah
APBD Kab.Purworejo Tahun 2015



Sumber Data: DPPKAD, LRA APBD Tahun 2011 s.d 2015

Pengeluaran pembiayaan dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 terdiri atas :

- a. Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tanggal 27 Juni 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan untuk penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai amanat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- c. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran pokok utang kepada Pemerintah berupa penerusan utang untuk kegiatan P3KT. Utang tersebut telah dapat dilbayar lunas pada tahun anggaran 2012.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kab.Purworejo
Tahun 2010 s.d 2014

	2011	2012	2013	2014	2015
PEMBIAYAAN DAERAH	71,030.41	103,926.97	139,281.70	210,351.49	182,516.35
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	74,087.58	115,892.13	145,744.70	223,321.88	213,818.39
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73,907.16	115,795.16	145,739.70	223,306.34	205,879.91
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.79
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	7.79	0.00	15.54	0.00
Penerimaan Dana Bergulir	180.42	89.18	5.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3,057.17	11,965.16	6,463.00	12,970.39	31,302.04
Pembentukan Dana Cadangan	1,000.00	2,100.41	2,000.00	2,366.96	302.04
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,939.00	9,368.00	4,463.00	10,603.43	31,000.00
Pembayaran Pokok Utang	110.39	496.75	0.00	0.00	0.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	71,030.41	103,926.97	139,281.70	210,351.49	182,516.35
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	115,795.16	145,739.70	221,933.28	205,879.91	239,648.00

Sumber data: DPPKAD, LRA Tahun 2011 s.d 2015

Selanjutnya untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah tahun depan diperlukan proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang sesuai. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,76% pada tahun 2017

Berdasarkan hasil penghitungan elastisitas (kepekaan) pajak dan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta rata-rata pertumbuhan untuk pos-pos pendapatan yang lainnya, maka pendapatan daerah secara proporsi masih akan didominasi oleh Dana Perimbangan, namun demikian pendapatan asli daerah terutama pajak dan retribusi diharapkan sinergis dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2017 yang akan datang.

Proyeksi selengkapnya sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Diagram 3.5.

**Proyeksi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Purworejo 2017**

	2017
PENDAPATAN	2,131,572,419,283.06
PAD	317,019,372,199.1
1. Pajak	72,074,179,344.0
2. Retribusi	34,215,179,065.6
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,419,685,796.4
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203,310,327,993.2
DANA PERIMBANGAN	1,371,694,103,072
1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	38,391,114,896
2. Dana Alokasi Umum	1,249,913,806,947
3. Dana Alokasi Khusus	83,389,181,229
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	442,858,944,012
1. Pendapatan Hibah	479,927,129
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91,904,612,136
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	305,525,578,889
4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	44,948,825,858

Sumber Data: Hasil Analisis Tim Penyusun

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada :

1. upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta
2. optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada tahun yang akan datang adalah melalui upaya adanya perimbangan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya, serta peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk membiayai program-program pembangunan yang mengarah pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah pada tahun 2017 diarahkan untuk mendanai prioritas dan sasaran daerah 2017 yang disusun dengan mengacu pada RPJPD serta kondisi eksisting daerah.

Adapun kebijakan belanja daerah pada tahun 2017 yang hendak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk tiap kelompok dan jenis belanja, sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketentuan mengenai pengelompokan belanja dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja, yaitu: (a)belanja pegawai, (b)belanja bunga, (c)belanja subsidi, (d)belanja hibah, (e)belanja bantuan sosial, (f)belanja bagi hasil, (g)belanja bantuan keuangan, (h)belanja tidak terduga. Belanja pegawai dianggarkan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan selain belanja pegawai berada di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Kebijakan umum untuk belanja tidak langsung disusun dengan memperhatikan pola pembagian kewenangan daerah, karena belanja tidak langsung salah satunya dapat diarahkan untuk digunakan mendanai hal-hal yang bukan merupakan kewenangan daerah dengan pertimbangan apabila pendanaan untuk membiayai kewenangan daerah telah terpenuhi

Penganggaran belanja pegawai dalam jangka menengah agar disinergikan dengan kebijakan-kebijakan bidang kepegawaian. Penganggaran belanja gaji dan tunjangan yang lebih akurat didasarkan

pada basis data pegawai / aparaturn pemerintahan daerah yang valid sehingga realisasi anggaran belanja pegawai dapat menggambarkan kebutuhan yang sesungguhnya

3.2.2.2 Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan Kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Kebijakan umum untuk belanja langsung utamanya adalah meliputi kebijakan tentang pengelolaan asset daerah, penangananan kewenangan daerah, standar serta kewajaran belanja.

Dalam mengalokasikan anggaran harus mengacu pada :

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran menyajikan informasi secara terbuka meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan.

- b. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- c. Keadilan anggaran

tidak adanya diskriminasi penetapan tariff dalam pungutan yang diberlakukan pada masyarakat, sedangkan dalam konteks belanja harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata tanpa diskriminasi.

- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, dan hasil, serta indikator prestasi kerja. Selain itu, penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan

dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Usulan program, kegiatan, dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya. Penilaian kewajaran meliputi:

- a. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi daerah;
- b. Kaitan logis antara permasalahan yang akan diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan;
- c. Kapasitas Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan;
- d. Keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah sehingga memberikan manfaat dampak positif bagi masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan umum anggaran Kabupaten Purworejo tahun 2017 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat public services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan

daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah.

Dalam hal terjadi defisit anggaran, jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian permasalahan - permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Penyelesaian permasalahan pembangunan melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui

- a. Strategi pembentukan dana cadangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat multi tahunan serta kemanfaatannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti untuk pendidikan, infrastruktur dll
- b. Pemberian pinjaman daerah kepada pihak ketiga misal dalam bentuk dana bergulir untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah, perlu diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan daerah